KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (NAGARI GUGUAK TABEK SARJO, KECAMATAN IV KOTO, KABUPATEN AGAM, SUMATERA BARAT)

Shafyra Amani[1]; Didin Muhafidin[2]; Neneng Weti Isnawaty[3]

[1,2,3]*Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia*

[1]shafyra18001@mail.unpad.ac.id; [2]didin_muhafidin@yahoo.co.id ; [3]nenengwety@gmail.com

ABSTRACT

This research stems from the implementation of infrastructure development in Guguak Tabek Sarojo Village, IV Koto Sub-district, Agam District, West Sumatra where several problems were found, including the non-realization of several infrastructure development activities, community needs related to public infrastructure that could not be met and complaints from the public. related to infrastructure development planning which is considered unfair. This problem appears allegedly influenced by the performance of the village administration. The theory used in this study is the theory of performance appraisal of public organizations described by Agus Dwiyanto (2006) which consists of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. The research method applied is qualitative research using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The results of the research that the authors got were that the performance of village government in implementing infrastructure development in Nagari Guguak Tabek Sarojo, IV Koto District, Agam Regency, West Sumatra was not optimal because there were several dimensions of measuring the performance of public sector organizations that could not be fulfilled properly, namely low ability to manage resources (productivity), low ability to develop programs (responsiveness) and low ability to provide services fairly (accountability). Even so, there are dimensions of measuring the performance of public sector organizations that have been fulfilled, including the ability to produce quality (quality of service), the ability to recognize community needs and develop priority scales of activities (responsiveness), and the existence of information disclosure to the public (accountability). The suggestion in this study is that the Village Government needs to improve its ability to develop ideas or ideas innovative for implementation of infrastructure development activities carried out in accordance with community needs and applicable regulations.

***Keywords**: Organizational Performance; Village Government; Infrastructure Development*

ABSTRAK

Penelitian ini bermula dari penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya tidak terealisasikannya beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur, adanya kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur publik yang belum dipenuhi serta adanya keluhan dari masyarakat terkait perencanaan pembangunan infrastruktur yang dianggap kurang adil. Permasalahan ini muncul diduga dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penilaian kinerja organisasi publik yang dipaparkan oleh Agus Dwiyanto (2006) yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Metode penelitian yang diterapkan ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian yang penulis dapatkan ialah kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat belum optimal karena ada beberapa dimensi pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang belum dapat terpenuhi dengan baik yaitu rendahnya kemampuan dalam mengelola sumber daya (produktivitas), rendahnya kemampuan dalam mengembangkan program (responsivitas) serta rendahnya kemampuan dalam memberikan pelayanan secara adil (akuntabilitas). Meskipun demikian terdapat dimensi pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang sudah terpenuhi diantaranya kemampuan dalam menghasilkan kualitas (kualitas layanan), kemampuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat serta menyusun skala prioritas kegiatan (responsivitas), dan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat (akuntabilitas). Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa perlu meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan gagasan atau ide yang inovatif terkait penyelenggaraan pembangunan infrastruktur kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta regulasi yang berlaku

Kata kunci: Kinerja Organisasi; Pemerintah Desa; Pembangunan Infrastruktur

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

PENDAHULUAN

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan utama penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan serta mengembangkan potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan infrastruktur di desa.

Nagari Guguak Tabek Sarojo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Nagari ini terdiri dari dua jorong yaitu: Jorong Guguak Tinggi dan Jorong Guguak Randah yang dihubungkan oleh ngarai yang mengelilingi kedua jorong tersebut. Nagari ini kaya akan potensi alam seperti lahan persawahan/ladang dan perhutanan, namun masyarakat belum bisa memanfaatkan potensi tersebut dengan maksimal karena tidak diiringi dengan peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga, potensi daerah yang berlimpah belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan mayoritas masyarakat Nagari Guguak Tabek Sarojo melakukan migrasi ke kota-kota besar seperti Kota Bukittinggi dan Kota Padang guna mencari pekerjaan yang lebih layak. Oleh karena itu, dibutuhkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat memaksimalkan potensi daerahnya dengan baik guna meningkatkan taraf hidup serta menanggulangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur sangat berarti bagi masyarakat Nagari Guguak Tabek Sarojo karena keberadaan infrastruktur yang baik dan memadai dapat meningkatkan produktivitas hingga menunjang kegiatan perekonomian. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan berupa pengadaan, pemeliharaan serta pemanfaatan infrastruktur publik seperti jalan nagari, jalan usaha tani, jalan antar pemukiman, jembatan, sanitasi lingkungan, pengelolaan air bersih, saluran irigasi, posyandu, MCK, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ).

Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintahan desa.

Pemerintahan desa sebagai lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam mengatur urusan desa. Pemerintahan desa yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Keberhasilan pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan desa karena mereka adalah aktor yang berperan dalam merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi suatu kebijakan termasuk menjadi pelaksana dalam pembangunan infrastruktur. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur karena pemerintahan desa berhubungan langsung dengan masyarakat dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Kinerja pemerintahan desa yang baik dalam pembangunan infrastruktur tentunya diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang optimal yaitu tersedianya infrastruktur publik yang dapat menunjang aktivitas masyarakat dan pemerintahan desa berkewajiban memberikan pelayanan secara prima yaitu dengan menyediakan infrastruktur publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kinerja pemerintahan desa juga menjadi gambaran untuk melihat sejauh mana proses serta pencapaian hasil suatu program yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa khususnya dalam hal pembangunan desa. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kinerja pemerintahan desa agar mampu mencapai tujuan organisasi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, berdasarkan penelitian awal yang sudah dilakukan terdapat beberapa indikasi masalah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di nagari tersebut, permasalahan ini muncul diduga dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan desa, diantaranya:

1. BAMUS Nagari (Badan Musyawarah Nagari) menerima keluhan dari masyarakat khususnya masyarakat Jorong Guguak Tinggi terkait perencanaan pembangunan infrastruktur yang dianggap kurang adil karena melihat adanya ketimpangan dalam pembagian anggaran untuk pembangunan infrastruktur antara kedua jorong.
2. Terdapat kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur publik yang belum dipenuhi. Sulitnya memperoleh sumber air membuat masyarakat tidak dapat memaksimalkan penggunaan lahan pesawahan atau ladang untuk bercocok tanam, sehingga dibutuhkan perbaikan dan pembangunan saluran tersier. Namun, hingga saat ini masih banyak saluran tersier pertanian yang belum dibangun secara permanen yang menyebabkan terjadinya penyumbatan dan pengairan yang tidak merata ke sawah-sawah.

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

3. Kegiatan pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo yang dimuat dalam RKP (Rancangan Kerja Pemerintahan) Nagari belum sepenuhnya terealisasi yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Realisasi Pembangunan Infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo Tahun 2019 - 2022

Tahun	Rencana Kegiatan Pembangunan	Realisasi	
		Terlaksana	Tidak Terlaksana
2019	12	8	4
2020	7	2	5
2021	8	4	4
2022	13	2	11

Sumber: (Pemerintah Nagari Guguak Tabek Sarojo, 2022)

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian dan pengungkapan permasalahan yang, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: "Kinerja Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur (Nagari Guguak Tabek Sarojo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat)".

METODE

Metode penelitian yang diterapkan ialah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan total informan sebanyak 9 orang yang terdiri dari Sekretaris Nagari, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Pelaksana Kewilayahan Wali Jorong, BAMUS Nagari dan Masyarakat Nagari Guguak Tabek Sarojo. Untuk menganalisis bagaimana Kinerja Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo, Kecamatan IV, Kabupaten Agam, Sumatera Barat penulis menggunakan teori pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto dalam (Dwiyanto, 2006):

1. Produktivitas
2. Kualitas Pelayanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produktivitas

Indikator ini digunakan untuk menganalisis kemampuan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa sumber daya anggaran yang mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur tersebut.

Pemerintah Nagari Guguak Tabek Sarojo sebagai organisasi publik di tingkat desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan lainnya guna memenuhi kepentingan masyarakat salah satunya di bidang pembangunan infrastruktur. Dalam menjalankan kewenangannya, Pemerintah Nagari mengandalkan pendapatan desa yang diperoleh dari Dana Nagari (DN), Alokasi Dana Nagari (ADN) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, dimana alokasi anggaran ini akan dimuat dalam RPJM Nagari yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Nagari, BAMUS Nagari dan Masyarakat dalam rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan RPJM Pemerintah Nagari Guguak Tabek Sarojo Tahun 2019 -2025, 40% dari total keseluruhan anggaran yaitu sebesar Rp. 19.702.259.000 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan nagari. Penjabaran rencana kegiatan pembangunan nagari yang akan diselenggarakan untuk satu tahun kegiatan akan dimuat dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Nagari.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan dari 40 rencana kegiatan pembangunan infrastruktur yang dimuat dalam RKP Nagari tahun 2019-2022, terdapat 24 kegiatan yang tidak direalisasikan pelaksanaannya, diantaranya: 4 kegiatan di tahun 2019, 5 kegiatan di tahun 2020, 4 kegiatan di tahun 2021 dan 11 kegiatan lainnya di tahun 2022. Permasalahan ini disebabkan karena adanya keterbatasan dana desa yang dapat digunakan oleh Pemerintah Nagari, hal ini dipengaruhi oleh perubahan regulasi pemanfaatan dana desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada awalnya dana desa bertujuan untuk membiayai kegiatan prioritas yaitu kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 tentunya mengubah tatanan ekonomi yang ada di masyarakat. Sehingga, dana desa dialihkan untuk biaya penanganan Covid-19 sebesar 70% dan 30% lainnya digunakan membiayai kegiatan prioritas. Penyesuaian pagu anggaran dana desa akibat pandemi Covid-19 ini membuat Pemerintah Nagari Guguak Tabek Sarojo harus mengatur ulang APB Nagari, sehingga terjadi pengurangan kegiatan pembangunan infrastruktur

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

yang akan dilaksanakan, dari 7 kegiatan hanya ada 2 kegiatan yang dapat direalisasikan pelaksanaannya.

Pada tahun 2021 Pemerintah Pusat mengeluarkan regulasi terkait pemanfaatan dana desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dapat mengurangi dampak Covid-19 baik dampak secara sosial maupun perekonomian. Regulasi tersebut membuat Pemerintah Nagari Guguak Tabek Sarojo memutuskan untuk memprioritaskan belanja nagari menjadi pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang tidak mampu dengan harapan pemberian BLT mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Nagari Guguak Tabek Sarojo akibat pandemi Covid-19. Perubahan regulasi ini berdampak pada pengurangan anggaran untuk beberapa kegiatan termasuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Sehingga kegiatan pembangunan infrastruktur yang terealisasikan pelaksanaannya pada tahun 2021 hanya ada 4 kegiatan saja.

Sama halnya dengan apa yang terjadi pada tahun 2022, dari 13 kegiatan pembangunan infrastruktur yang dimuat dalam RKP Nagari hanya 2 kegiatan yang terealisasikan pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi pemanfaatan dana desa yang menjelaskan bahwa tujuan penggunaan dana desa pada tahun 2022 akan diprioritaskan untuk membiayai kegiatan percepatan pencapaian SDGs salah satunya dengan penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani agar dapat mewujudkan desa tanpa kelaparan. Mengacu pada regulasi ini, Pemerintah Nagari Guguak Tabek Sarojo hanya menyelenggarakan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani di nagari dengan meningkatkan produktivitas pertanian.

Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo dibiayai dari dana desa yang bersumber Pemerintah Pusat. Namun, Pemerintah Nagari belum mampu mengoptimalkan penggunaan dana desa tersebut yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Pagu Anggaran Bidang Pembangunan Infrastruktur Nagari Guguak Tabek Sarojo Tahun 2019 – 2021

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
2019	Rp 642.404.070	Rp 549.092.332	85%
2020	Rp 298.050.970	Rp 256.347.026	86%
2021	Rp 466.187.412	Rp 398.158.129	85%

Sumber: (Pemerintah Nagari Guguak Tabek Sarojo, 2022)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa, Pemerintah Nagari Guguak Tabek Sarojo belum mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang ditunjukkan dari realisasi penyerapan anggaran yang belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena dilibatkannya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melakukan survei bahan material, sehingga kuantitas dan kualitas bahan yang dipesan berbeda dengan kuantitas dan kualitas bahan yang dibutuhkan di lapangan. Selain itu, dalam membuat RAB Pemerintah Nagari Guguak Tabek Sarojo hanya mengandalkan survei sekunder melalui internet untuk mengetahui harga bahan material atau bahan bangunan yang akan dibutuhkan, sehingga harga yang dimuat dalam RAB bukanlah harga yang konkret karena harga di lapangan berbeda dengan harga yang ada di internet. Ditambah lagi dengan adanya ketidaksesuaian antara kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan dengan regulasi yang berlaku, sehingga dana yang dimiliki tidak dapat digunakan semaksimal mungkin.

Kualitas Layanan

Indikator ini digunakan untuk menganalisis kemampuan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang sesuai dengan keinginan masyarakat agar dapat tercapainya kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan karena *feedback* masyarakat perlu diperhitungkan.

BAMUS Nagari sebagai lembaga eksekutif di tingkat desa memiliki peranan untuk menjaring serta menghimpun aspirasi dan penilaian dari masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat ini dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur resmi dan jalur tidak resmi. Melalui jalur resmi dengan cara menyelenggarakan musyawarah kenagarian seperti Musyawarah Jorong, Musna (Musyawarah Nagari) dan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Sementara itu untuk penjaringan aspirasi melalui jalur

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

tidak resmi dilakukan melalui media yang disediakan oleh BAMUS Nagari yaitu kotak saran ataupun menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Setiap aspirasi yang masuk ke BAMUS Nagari akan di proses dan ditindak lanjuti dan disampaikan ke pihak terkait misalnya Wali Jorong ataupun Wali Nagari.

Pemerintahan Nagari Guguak Tabek Sarojo menyadari bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ini belumlah sempurna, hal ini dapat dilihat dari adanya kritik dan saran dari masyarakat. Kritik dan saran ini dijadikan sebagai bahan evaluasi agar Pemerintahan Nagari dapat memperbaiki kinerja mereka ditahun selanjutnya karena kritikan yang disampaikan oleh masyarakat merupakan kritikan konstruktif. Aspirasi dari masyarakat dapat terhimpun karena masyarakat selalu antusias untuk hadir dalam kegiatan kenagarian yang membuka ruang diskusi antara masyarakat dengan Pemerintahan Nagari.

Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur karena pada hakikatnya pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di nagari serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat dengan prinsip pemberdayaan dan mempertimbangkan keadilan gender. Partisipasi masyarakat dapat menjadi alat guna Pemerintahan Nagari dalam memperoleh informasi mengenai kondisi serta kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat tepat sasaran.

Dalam RPJM Pemerintah Nagari Guguak Tabek Sarojo Tahun 2019 – 2025 diketahui bahwa rencana kegiatan Pemerintah Nagari di bidang penyelenggaraan pembangunan nagari tidak hanya berfokus pada pengadaan sarana dan prasarana publik. Namun juga mengutamakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana publik yang sudah ada melalui kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan seperti kegiatan perbaikan dan pemeliharaan Jln. Lingkar Bukik Apik Padang Tinggi Koto di Jorong Guguak Tinggi, Rehab Total Pagar TK Kuntum Mekar di Jorong Guguak Tinggi, dan Rehab Lantai MDA Istiqamah di Jorong Guguak Randah yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan juga Perbaikan Drainase Lapangan Tanah Lapang di Jorong Guguak Tinggi yang dilaksanakan pada tahun 2021.

Pemerintahan Nagari Guguak Tabek Sarojo menyadari bahwa upaya untuk meningkatkan serta menjaga kualitas pembangunan infrastruktur sangat penting untuk dilakukan agar dapat menghasilkan infrastruktur yang tahan lama, mengingat infrastruktur dibangun dengan tujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya terhadap sarana dan prasarana publik yang menunjang aktivitas / kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, Pemerintahan Nagari memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan sarana dan prasarana yang berkualitas dengan membuat perencanaan yang matang termasuk dalam menyediakan bahan material atau bahan bangunan yang berkualitas.

Responsivitas

Indikator ini digunakan untuk menganalisis kemampuan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun skala prioritas serta mengembangkan program pembangunan infrastruktur sehingga mampu mengatasi berbagai macam permasalahan di tengah masyarakat.

Pertama, kemampuan Pemerintahan Nagari dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mengenali kebutuhan masyarakat, Pemerintah Nagari mengerahkan Wali Jorong selalu Kepala Kewilayahan dan bekerja sama dengan BAMUS Nagari selaku Lembaga Perwakilan Rakyat untuk menggali dan mengenali aspirasi masyarakat di jorongnya masing-masing khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Penggalian aspirasi ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat mulai dari kelompok pemuda, kelompok bundo kanduang, kelompok niniak mamak, kelompok alim ulama, kelompok tani / pengrajin, hingga kelompok masyarakat miskin melalui pelaksanaan Musyawarah Jorong.

Berdasarkan hasil Musyawarah Jorong tahun 2021 terkait pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, Masyarakat Jorong Guguak Randah mengusulkan 20 kegiatan. Sementara itu, Masyarakat Jorong Guguak Tinggi mengusulkan 29 kegiatan. Namun, tidak semua kegiatan yang diusulkan ini dapat terealisasikan pelaksanaannya karena adanya keterbatasan anggaran yang diperoleh oleh Pemerintahan Nagari. Oleh karena itu, Pemerintahan Nagari Guguak Tabek Sarojo akan menyaring usulan dan menyusun skala prioritas sesuai urgensi kebutuhan masyarakat pada saat itu

Kedua, kemampuan Pemerintahan Nagari Guguak Tabek Sarojo dalam menyaring usulan serta

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

menyusun prioritas kegiatan. Setelah diadakan Musyawarah Jorong untuk menampung seluruh usulan masyarakat di jorongnya masing-masing, selanjutnya diadakan Musyawarah Nagari (Musna) untuk menyaring usulan serta menyusun prioritas kegiatan sesuai urgensi kebutuhan masyarakat pada saat itu, termasuk prioritas kegiatan untuk bidang pembangunan infrastruktur.

Penyusunan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mempertimbangkan seluruh usulan dari masyarakat kemudian disusun skala prioritasnya berdasarkan pedoman pemanfaatan dana desa dan urgensi kebutuhan masyarakat dengan cara mempertimbangkan strategisannya, manfaatannya, kelayakannya, serta hasil verfal (verifikasi dan validasi) dari kegiatan tersebut. Diharapkan dengan adanya penyusunan prioritas kegiatan ini, pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo dapat terlaksana dengan tepat sasaran.

Dalam menentukan prioritas kegiatan, Pemerintahan Nagari melibatkan masyarakat dengan cara membagi perwakilan kelompok masyarakat yang hadir pada saat Musna ke dalam beberapa kelompok, jumlah kelompok tersebut disesuaikan dengan jumlah bidang yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari. Setiap kelompok akan melakukan diskusi secara terarah untuk kemudian bersepakat menentukan kegiatan mana yang akan menjadi prioritas pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Setelah seluruh kelompok menentukan prioritas kegiatannya, Pemerintahan Nagari akan memverifikasi dan memvalidasi prioritas kegiatan tersebut serta menyesuaikannya dengan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan hasil Musyawarah Nagari dari 20 usulan kegiatan yang diusulkan oleh Masyarakat Jorong Guguak Randah hanya ada 5 usulan yang akan diajukan dalam penyusunan RKP Pemerintah Nagari tahun 2022. Sedangkan usulan kegiatan Masyarakat Jorong Guguak Tinggi yang berjumlah 29 kegiatan hanya ada 5 usulan yang akan diajukan dalam RKP Pemerintah Nagari tahun 2022.

Ketiga, kemampuan Pemerintahan Nagari dalam mengembangkan program pembangunan infrastruktur. Program pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Guguak Tabek Sarojo dimuat dalam RKP Pemerintah Nagari yang ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Pada saat Musrenbang Nagari ditetapkan program prioritas nagari yang akan dibiayai oleh pemerintah dengan memanfaatkan dana APB Nagari, APBD Kabupaten serta anggaran bantuan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Jika anggaran yang tersedia hanya mampu untuk menyelenggarakan satu usulan, maka usulan yang dipilih adalah usulan yang terletak pada prioritas pertama. Namun, jika ada kelebihan anggaran maka anggaran tersebut akan dialokasikan untuk usulan selanjutnya sesuai dengan urutan prioritas kegiatan yang sudah ditetapkan dan akan disahkan melalui Perubahan RKP Nagari. Akan tetapi, jika tidak ada kelebihan anggaran, maka usulan lain yang belum terlaksana akan diajukan kembali di tahun yang akan datang. Hasil Musrenbang Nagari ini akan diusulkan pada saat pembuatan Musrenbang Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam.

Berdasarkan hasil Musrenbang Nagari tahun 2021 dari 10 kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah disepakati Musna, seluruh kegiatan tersebut menjadi bagian dari rencana kegiatan pembangunan infrastruktur Pemerintah Nagari Guguak Tabek Sarojo Tahun 2022. Selain itu, Pemerintah Nagari juga menambahkan 2 kegiatan pembangunan infrastruktur untuk Jorong Guguak Randah dan 1 kegiatan pembangunan infrastruktur untuk Jorong Guguak Tinggi karena melihat ketersediaan anggara. Meskipun demikian, pada akhirnya Pemerintahan Nagari hanya mampu menyelenggarakan 2 kegiatan saja karena 11 kegiatan yang ditetapkan karena 9 kegiatan lainnya tidak sesuai dengan regulasi pedoman pemanfaatan dana desa. Banyaknya kegiatan pembangunan infrastruktur yang tidak terlaksana akibat ketidaksesuaian dengan regulasi pemanfaatan dana desa, menunjukkan rendahnya kemampuan Pemerintahan Nagari dalam mengembangkan program pembangunan infrastruktur.

Responsibilitas

Indikator ini digunakan untuk menganalisis kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat sesuai dengan prinsip administrasi berupa peraturan hingga petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dijadikan sebagai acuan.

Pembagian tugas dan wewenang dilakukan agar tidak adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja, sehingga pihak yang terlibat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal agar dapat menghasilkan kinerja yang dapat

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

dipertanggungjawabkan. Dari beberapa peraturan / regulasi yang berlaku serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat diketahui tugas dan wewenang dari setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sebagai berikut:

1. Wali Nagari berperan dalam tahap perencanaan dengan menetapkan TPK serta Pelaksana Kegiatan dan mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKP Nagari, serta berperan dalam tahap evaluasi melalui penilaian terhadap pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan
2. BAMUS Nagari berperan dalam tahap perencanaan dengan menghimpun dan menjaring aspirasi masyarakat, berperan dalam tahap pelaksanaan melalui pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta pengawasan kinerja Wali Nagari beserta perangkatnya dan juga berperan dalam tahap evaluasi pelaksanaan tugas melalui tertulis yang diserahkan oleh Wali Nagari.
3. Pendamping Lokal Desa berperan tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi melalui peningkatan partisipasi masyarakat serta kegiatan pendampingan yang dilakukan guna mempercepat pencapaian kemandirian nagari dan kesejahteraan masyarakat
4. TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang terdiri dari perangkat nagari, lembaga kemasyarakatan nagari dan masyarakat nagari berperan dalam tahap perencanaan dengan melakukan survei barang, mendata calon penyedia dan memperhitungkan kebutuhan bahan, berperan dalam tahap pelaksanaan dengan melaksanakan pembangunan sesuai desain RAB dan jadwal kegiatan, dan juga berperan dalam tahap evaluasi melalui laporan perkembangan kegiatan dan laporan penggunaan bahan bangunan
5. Pelaksana Pekerjaan yang terdiri dari kelompok kerja (tukang dan pekerja) berperan dalam tahap pelaksanaan melalui pelaksanaan pembangunan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis serta mempertanggungjawabkan progres dan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada TPK
6. Masyarakat Nagari berperan dalam tahap perencanaan pembangunan dengan mengemukakan aspirasi, berperan dalam tahap pelaksanaan dengan menjadi salah satu bagian dari TPK dan juga berperan dalam tahap evaluasi dengan mengetahui laporan pelaksana kegiatan pembangunan yang diinformasikan oleh Pemerintah Nagari

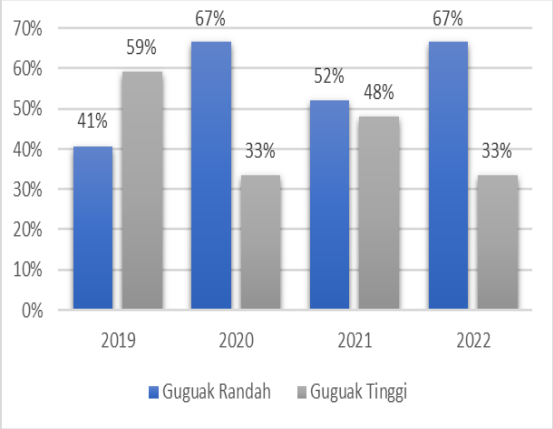

7. Penyedia yang merupakan adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan bahan bangunan berperan dalam tahap pelaksanaan dengan menyediakan bahan bangunan yang sesuai spesifikasi dan kuantitas yang dibutuhkan

Meskipun demikian, BAMUS Nagari masih belum menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal khususnya dalam menghimpun aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menyampaikan aspirasinya secara langsung ke Pemerintah Nagari. Selain itu, BAMUS belum menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal. Hal ini dilihat dari ketidakhadiran BAMUS pada saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta ketidakhadiran BAMUS di rapat-rapat tertentu.

Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menganalisis kemampuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat sesuai dengan nilai dan norma pelayanan publik yang berkembang di masyarakat berupa transparansi dan keadilan.

Pertama, transparansi. Pemerintahan Nagari sebagai salah satu badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan atau menyediakan keterbukaan informasi kepada masyarakat karena masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi terkait pengembangan dirinya dan lingkungannya, hal ini dijamin oleh negara dalam Undang-Undang

Bagan 1.1 Distribusi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tahun 2019 - 2022

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi terhadap Publik.

Jika dilihat dari kondisi di lapangan, Pemerintahan Nagari Guguak Tabek Sarojo telah

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

melakukan transparansi terkait penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Transparansi ini ditunjukkan dengan adanya penyampaian hasil penyelenggaraan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat nagari baik secara lisan maupun non lisan. Penyampaian hasil dilakukan disampaikan dalam kegiatan keramaian di nagari, seperti: Musyawarah Jorong, Musyawarah Nagari (Musna),

Kegiatan Kemasyarakatan, Sidang Juma't ataupun kegiatan lainnya yang mempertemukan Pemerintahan Nagari dengan Masyarakat Nagari. Sementara itu, untuk penyampaian hasil secara non lisan dilakukan dengan pemajangan baliho yang berisikan uraian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam 1 tahun anggaran salah satunya memuat tentang penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Uraian kegiatan yang dimuat dalam baliho tersebut terdiri dari nama kegiatan, rencana anggaran biaya yang akan dibutuhkan hingga alokasi anggaran yang telah digunakan. Baliho ini dipajang di tempat-tempat strategis yang ada di nagari, seperti: Alun-Alun Nagari, Kantor Wali Nagari, dan Kantor Jorong.

Sumber : (Pemerintah Nagari Guguk Tabek Sarojo, 2022)

Kedua, keadilan. Pemerintahan Nagari sebagai organisasi penyelenggaraan publik dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi asas-asas pelayanan publik seperti penyelenggaraan pelayanan secara profesional, mengutamakan kepentingan umum, menjamin kepastian hukum, keterbukaan serta keadilan dan tidak diskriminatif.

Keadilan dalam pemberian layanan menjadi salah satu prinsip dari pembangunan infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo, hal ini dimuat dalam Petunjuk Teknis Pelaksana Kegiatan Pembangunan

bahwa kegiatan pembangunan di nagari dilaksanakan secara adil yang mengandung makna Pemerintahan Nagari harus memberikan perlakukan yang sama bagi semua pihak serta mengusahakan untuk memperluas jangkauan pembangunan infrastruktur agar distribusi layanan dapat merata bagi semua lapisan masyarakat.

Penilaian kinerja Pemerintahan Nagari Guguak Tabek Sarojo dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dinilai masih kurang adil oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya keluhan yang diterima oleh BAMUS Nagari dari masyarakat Jorong Guguak Tinggi. Masyarakat Jorong Guguak Tinggi merasa Pemerintahan Nagari Guguak Tabek Sarojo bersikap kurang adil dalam menentukan distribusi pembangunan infrastruktur karena melihat adanya ketimpangan dalam pembagian anggaran antara kedua jorong. Selain itu Masyarakat Jorong Guguak Tinggi juga merasa adanya perbedaan yang signifikan terkait kualitas sarana dan prasarana publik di kedua jorong. Berikut ini merupakan data distribusi anggaran untuk kedua jorong:

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2022 anggaran pembangunan infrastruktur lebih dominan diberikan kepada Jorong Guguak Randah. Bahkan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 anggaran pembangunan infrastruktur lebih dominan diberikan kepada Jorong Guguak Randah. Bahkan pada tahun 2020 dan 2022, Jorong Guguak Tinggi hanya memperoleh 33% dari dari total anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Nagari. Adanya ketimpangan dalam pembagian anggaran ini memicu kecemburuan sosial di tengah Masyarakat Jorong Guguak Tinggi, hingga mereka melakukan protes ke kantor Pemerintah Nagari untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung karena merasa BAMUS Nagari kurang responsif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Akibatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur mengalami keterlambatan. Jorong Guguak Tinggi merupakan pusat pemerintahan Nagari Guguak Tabek Sarojo, di jorong inilah terdapat Kantor Wali Nagari, Kantor BAMUS Nagari, Kantor KAN dan kantor lembaga pemerintahan lainnya. Pada dasarnya wilayah yang dijadikan pusat pemerintahan tentu memiliki sarana dan prasarana publik yang memadai. Namun berbeda dengan Jorong Guguak Tinggi sebagai jorong yang menjadi pusat pemerintahan nagari, jorong ini belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai hal ini dapat dilihat dari beberapa fasilitas publik yang sudah tidak layak pakai seperti Kantor Wali Jorong Guguak Tinggi yang bangunannya masih semi permanen, Posyandu Terintegrasi di Jorong Guguak Tinggi yang
belum dilengkapi dengan fasilitas penunjang, serta jumlah ruang kelas TK Kuntum Mekar yang ada di Jorong Guguak Tinggi juga belum mampu menunjang proses pembelajaran secara optimal.

Perbedaan kondisi sarana dan prasarana publik antara Jorong Guguak Randah dan Jorong Guguak Tinggi serta adanya ketimpangan dalam pembagian anggaran membuat masyarakat Jorong Guguak Tinggi menilai Pemerintahan Nagari Guguak Tabek Sarojo belum bersikap adil dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur.

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa Kinerja Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur di Nagari Guguak Tabek Sarojo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih belum optimal dikarenakan terdapat beberapa dimensi pengukuran kinerja organisasi sektor publik belum dapat terpenuhi dengan baik. Produktivitas, kemampuan Pemerintahan Desa dalam mengelola sumber daya anggaran yang menjadi sumber daya pendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur masih rendah sehingga sumber daya anggaran tersebut belum dapat menghasilkan *output* sesuai yang diharapkan. Responsivitas, kemampuan Pemerintahan Desa dalam mengembangkan kegiatan pembangunan infrastruktur masih rendah sehingga banyak program kegiatan yang tidak terlaksana akibat adanya ketidaksesuaian antara kegiatan yang diajukan dengan regulasi yang berlaku. Akuntabilitas, rendahnya kemampuan Pemerintahan Desa memberikan pelayanan secara adil membuat distribusi pembangunan infrastruktur antara kedua jorong menjadi tidak merata.

Meskipun demikian sudah ada dimensi yang terpenuhi yaitu kualitas layanan yang ditunjukkan dengan adanya keterbukaan Pemerintah Desa terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat, perencanaan yang matang serta kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan agar dapat menjaga kualitas pelayanan guna memberikan kepuasan kepada masyarakat. Responsivitas, kemampuan Pemerintah Desa dalam mengenali kebutuhan masyarakat serta menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan infrastruktur sudah cukup baik. Responsibilitas, dalam pembangunan infrastruktur Pemerintah Desa sudah menjalankan pelayanan sesuai dengan prinsip administrasi serta regulasi yang berlaku. Akuntabilitas, kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan sesuai nilai dan norma yang berkembang di masyarakat yaitu transparansi. Pemerintah Desa sudah melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan baik secara lisan maupun non lisan. Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Nagari Guguak Tabek Sarojo perlu meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan gagasan atau ide yang inovatif terkait kegiatan pembangunan infrastruktur kegiatan yang dilaksanakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Bukit, B., Malusa, T., & Rahmat, A. (2017). *Pengembangan Sumber Daya Manusia. Teori, Dimensi Pengukuran,*.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design* (Third Edit). SAGE Publication Inc.

Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Kabir, S. M. S. (2016). Basic Guidelines for Research: An Introductory Approach for All Disciplines. *Book Zone Publication*, *May*, 201–275.

Kodoatie, R. (2005). *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Pustaka Pelajar.

Lichtman, M. (2013). *Qualitative Research in Education: A User's Guide*. SAGE Publication Inc.

Ma'ruf, A. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Penerbit Aswaja Pressindo.

Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE.

Mahsun, M., S, F., & P, H. A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta.

Mankiw, G. (2003). *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Gramedia Pustaka Umum.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Edition 3). SAGE Publication Inc.

Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Teachers College Columbia University. (2021). Research Instrument Examples. In *Columbia University*.

eISSN : 2597-758X
pISSN : 2086-1338